

Kebijakan Industrialisasi Bangladesh dalam Menarik Investasi Asing Sebagai Dampak Kebijakan Neoliberalisme

Lucitania Rizky¹ & Hidayat Chusnul Chotimah²

TransBorders*

Abstract

Bangladesh is one of the developing countries in South Asia that succeed to implement industrialization policy to attract foreign direct investment in there. Political factors in Bangladesh have a very important role in determining neoliberal policies to support the economic development process. Neoliberalism policy here does not mean that the state does not support the economy. Market relations and market shifts require a state, or an agency related to the state, to discuss and protect private property and enforce contracts that are important features of market transition. In this case, the support of the Bangladeshi government in supporting the entry of investors is done by asking for such economic liberalization, privatization of state-owned enterprise, providing incentives to foreign investors and supporting with skilled labor and low wages. To accelerate the neoliberal policy agenda, the government of Bangladesh then undertook a integration process of national economic with the global economy, strengthened the role of the Bangladesh government in supporting neoliberalism policy, providing facilities for the movement of capital and labor and strengthened the corporate sector in industrialization policies in Bangladesh.

Keywords: *Industrial Policy; Foreign Investmen; Neoliberalism; Bangladesh*

Abstrak

Bangladesh merupakan salah satu negara berkembang di Asia Selatan yang berhasil menerapkan kebijakan industrialisasinya guna menarik perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di sana. Faktor politik di Bangladesh memiliki andil yang sangat penting dalam menentukan kebijakan neoliberal dalam mendukung proses pembangunan ekonomi di negara tersebut. Kebijakan neoliberalisme di sini bukan berarti negara tidak berperan dalam ekonomi. Hubungan pasar dan pertukaran pasar mensyaratkan suatu negara, atau lembaga serupa negara, untuk mendefinisikan dan melindungi hak milik pribadi dan menegakkan kontrak yang merupakan fitur penting dari pertukaran pasar. Dalam hal ini, upaya pemerintah Bangladesh dalam mendukung masuknya investor asing dilakukan dengan menerapkan seperti liberalisasi ekonomi, privatisasi terhadap sejumlah perusahaan nasional, pemberian insentif kepada para investor asing dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan upah yang rendah. Untuk mempercepat agenda kebijakan neoliberal tersebut pemerintah Bangladesh kemudian melakukan proses integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global, memperkuat peran pemerintah Bangladesh dalam mendukung kebijakan neoliberalisme, memberikan

¹ Prodi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: lucitania.rizky@staff.uty.ac.id

² Prodi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: hidayat.chotimah@staff.uty.ac.id

* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS
Email: trans'borders@unpas.ac.id

kemudahan terhadap pergerakan modal dan tenaga kerja serta penguatan *corporate sector* dalam kebijakan industrialisasi di Bangladesh.

Kata Kunci: Kebijakan Industrialisasi; Investasi Asing; Neoliberalisme; Bangladesh

Pendahuluan

Derasnya arus globalisasi dimanfaatkan Bangladesh untuk melakukan liberalisasi pasar dalam rangka menarik investasi asing. Upaya harmonisasi negara Bangladesh dengan pasar global menuai keberhasilan dengan adanya kenaikan pertumbuhan investasi di sektor garmen. Hal ini yang kemudian menempatkan sektor garmen sebagai komoditi industri dan strategi ekspor di Bangladesh karena memiliki peranan yang penting dalam roda pembangunan ekonomi Bangladesh (Lewis, 2011)

Bangladesh pada dasarnya adalah negara ekonomi agraris. Namun dalam rangka agenda pembangunan, ekonomi berbasis industri menjadi sangat penting. Sehingga, Bangladesh mulai bergerak dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Pemerintah Bangladesh berusaha menciptakan lingkungan investasi yang baik dengan memperkenalkan kebijakan ekonomi, insentif bagi investor asing, dan melakukan promosi privatisasi dan kebijakannya (Rahman, 2012: 1).

Faktor penting yang membuat Bangladesh menjadi tujuan investor asing adalah memiliki tenaga kerja terampil dengan upah yang relatif rendah dan keadaan makro ekonomi yang cukup stabil. Dijelaskan lebih jauh dalam penelitian Afsana Rahman, bahwa dengan tingkat upah terendah di antara negara-negara Asia, tingkat inflasinya dapat ditolerir, nilai tukar yang stabil, peraturan investasi yang ramah dan paket insentif uang menarik membuat Bangladesh menjadi tujuan investasi yang menguntungkan bagi para investor, khususnya di sektor garmen (Rahman, 2012: 1-1). Kondisi tersebut dipengaruhi

oleh adanya kebijakan neoliberal yang diterapkan di Bangladesh.

Ajaran neoliberalisme pada dasarnya merupakan pengembangan atas pendekatan liberal klasik dari Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-18-23) dan Herbert Spencer (1820-1903) (Syeirazi, 2003: 17). Tokoh yang merupakan penggagas dari pemikiran neoliberalisme yaitu Frederich Von Hayek dan Milton Friedman, menyebutkan bahwa pemberian subsidi, tindakan stabilisasi dan suntikan terhadap dana investasi yang dilakukan oleh negara dianggap akan membangkrutkan negara tersebut (Rachmat, 2013: 30). Sebagai paradigma ekonomi-politik, neoliberalisme pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan memperoleh penerimaan pada tahun 1980-an dengan dukungan yang agresif dari Ronald Regan dan Margaret Thatcher (Shamit, 2016:1).

Ketika bentuk kapitalisme pasar bebas mulai muncul di Amerika Serikat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, pada mulanya berbagai istilah yang dianalogikan dengan kapitalisme dan pemikiran neoliberalisme diterapkan, seperti ekonomi konservatif, Reaganomik, atau sekadar ekonomi pasar bebas. Setelah bentuk kapitalisme ini menyebar ke seluruh dunia, istilah “neoliberalisme” secara bertahap mulai digunakan secara umum untuk mengindikasikan bentuk baru dari ide, kebijakan, dan institusi liberal (pasar bebas) (Kotz, 2015:8).

Konsep kapitalisme neoliberal atau pasar bebas, tidak berarti bahwa negara tidak berperan dalam ekonomi. Hubungan pasar dan pertukaran pasar mensyaratkan suatu negara, atau lembaga serupa negara, untuk mendefinisikan dan melindungi hak milik pribadi dan untuk menegakkan kontrak yang merupakan fitur penting dari

pertukaran pasar. Setiap masyarakat berskala besar membutuhkan negara, atau lembaga serupa negara, untuk menjaga ketertiban. Arti dari “pasar bebas” dalam konteks ini adalah bahwa peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi terbatas sehingga menempatkan hubungan pasar dan kekuatan pasar sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi yang tentu saja beroperasi dalam kerangka yang disediakan oleh negara (Kotz, 2015:9).

Neoliberalisme mengacu pada trilogi kebijakan yang dikenal sebagai liberalisasi, privatisasi, dan stabilisasi sebagai sarana untuk mengubah institusi kapitalisme yang diregulasi, menjadi institusi kapitalisme neoliberal. Lembaga utama yang berubah secara radikal dengan munculnya kapitalisme neoliberal terbagi dalam empat kategori: 1) ekonomi global (*global economy*); 2) peran pemerintah dalam ekonomi; 3) hubungan modal-tenaga kerja (*capital-labor relation*); dan 4) sektor korporasi (*corporate sector*) (Kotz, 2015:12).

Merujuk pada konsep neoliberalisme yang sudah dipaparkan di atas, penulis berasumsi bahwa keberhasilan Bangladesh dalam menarik investor asing merupakan bagian dari kebijakan industrialisasi yang dikeluarkan oleh rezim politik domestik Bangladesh yang pro terhadap kebijakan neoliberal. Oleh sebab itu, paper ini akan dibagi ke dalam empat bagian analisis dengan merujuk konsep neoliberal yang dijelaskan oleh Kotz yaitu pertama menyangkut proses integrasi Bangladesh dengan ekonomi global, yang kedua menganalisis bagaimana peran pemerintah Bangladesh dalam kebijakan neoliberalisme, yang ketiga menganalisis hubungan antara modal dan tenaga kerja (*Capital-Labor Relation*) di Bangladesh, dan yang keempat menganalisis tentang penguatan *corporate sector* dalam kebijakan industrialisasi di Bangladesh.

Proses Integrasi Bangladesh dengan Ekonomi Global

Untuk menerapkan kebijakan neoliberal, negara-negara di dunia internasional, tidak terkecuali Bangladesh perlu melakukan proses integrasi ekonomi domestiknya dengan ekonomi global. Sejak pertengahan tahun 1950-an, momentum proses integrasi ekonomi Bangladesh dengan ekonomi global telah dimulai. Hal ini terlihat dari adanya proyek-proyek pembangunan berbasis bantuan asing (*foreign aid*) dan intervensi dari organisasi-organisasi internasional dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya air melalui program “*green revolution*” pada 1960-an (lihat Tabel 1). Arus masuk bantuan asing ke Bangladesh mengalami peningkatan besar dengan dibentuk sebuah konsorsium bantuan untuk Bangladesh di bawah Bank Dunia (Muhammad, 2006: 1460).

Table 1 Programmes initiated in Bangladesh by Global Institutions at Different Periods

Period	Programmes Initiated
1950s and after	Foreign aid, education and training programme, Krug mission and water resource projects
1960s and after	Green Revolution
1970s and after	Poverty Alleviation Programmes, NGOs
1980s and after	Structural Adjustment Programmes (SAP)
1990s	GATT Agreement
2001 and after	Poverty Reduction Strategic Paper (PRSP)

Sumber: Muhammad, 2006

Beberapa organisasi internasional yang terlibat dalam membantu pemerintah Bangladesh tidak hanya menghadirkan organisasi Bank Dunia tetapi juga melibatkan organisasi internasional lain seperti IMF, WTO, UNDP, USAID dan ADB (Khan, 2013:38). Keterlibatan

lembaga-lembaga global tersebut memiliki peranan yang vital karena mensponsori program-program ekonomi dan pembangunan di Bangladesh sehingga mempercepat proses integrasi ekonomi Bangladesh dengan ekonomi global. Beberapa program tersebut adalah (i) *green revolution*, (ii) Program Penyesuaian Struktural atau *structural adjustment programme* (SAP), (iii) Program Pengentasan Kemiskinan (*poverty alleviation*), (iv) perjanjian GATT, (v) Bantuan luar negeri yang ditujukan untuk mendukung perdagangan, bantuan teknis, reformasi, konsultasi, pelatihan dan Pendidikan, dan (vi) *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP) (Muhammad, 2006: 1461).

Berdasarkan rekomendasi dari Bank Dunia dan IMF, Bangladesh kemudian menggeser orientasi ekonominya dari substitusi impor ke strategi berorientasi ekspor pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini diimplementasikan melalui pengadopsian Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang didirikan oleh IMF pada tahun 1987, dengan memberikan pinjaman untuk pembangunan di Bangladesh. Untuk menerapkan SAP, Bangladesh harus melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan, sehingga ekonomi Bangladesh juga bergeser dari basis pertanian ke ekonomi jasa (Khan, 2013:39).

Kebijakan SAP yang diterapkan di Bangladesh ditujukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan PDB, meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan pajak PDB dan rasio pendapatan PDB, mempromosikan ekspor, memobilisasi dan meningkatkan tabungan dan investasi, menarik investasi swasta asing, dan sebagainya. Bangladesh telah memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tujuan memperluas dukungan pajaknya. Selain itu, tingkat tarif impor maksimum dikurangi dari 250 persen menjadi hanya 45 persen dan tingkat tarif impor tertimbang perdagangan turun

menjadi sekitar 21 persen hanya selama 1995-1996 (Ahmed, 2008:7).

Di Bangladesh ekspor telah mencatat tingkat pertumbuhan yang tinggi di mana pada tahun 1982 hanya mencapai 5 persen, kemudian pada tahun 1995 dan 1999 mencapai 12 persen dan 15 persen. Defisit anggaran juga turun menjadi 5,3 persen dari PDB pada 1998-1999 setelah turun dari 7,9 persen pada 1989-1990. SAP dianggap telah meningkatkan spesialisasi dalam ekspor Bangladesh berdasarkan komoditas dan tujuan. Misalnya, garmen menyumbang lebih dari 75 persen dari total pendapatan ekspor Bangladesh (Ahmed, 2008:8).

Di samping keterlibatan dari lembaga-lembaga internasional, Bangladesh juga mempercepat proses integrasi ekonominya dengan ekonomi global melalui perjanjian perdagangan dengan negara lain di bawah kerangka *bilateral investment treaties* (BIT). Bangladesh telah melakukan upaya dalam menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui BIT sejak tahun 1980 (lihat Tabel 2).

Tabel 2 BIT Bangladesh dari Tahun 1980-1986

No	Short Title	Status	Parties	Date of Signature	Date of Entry Into Force
1	Bangladesh-United Kingdom BIT (1980)	In force	United Kingdom	19/06/1980	19/06/1980
2	Bangladesh - Germany BIT (1981)	In force	Germany	06/05/1981	14/09/1986
3	Bangladesh - BLEU (Belgium-Luxembourg Economic Union) BIT (1981)	In force	BLEU (Belgium - Luxembourg Economic Union)	22/05/1981	15/09/1987
4	Bangladesh - France BIT (1985)	In force	France	10/09/1985	09/10/1986
5	Bangladesh	In	United	12/03/19	25/07/19

	h – United States of America (1986)	force	States of America	86	89
6	Banglades h – Korea, Republic of BIT (1986)	In force	Korea, Republic of	18/06/1986	06/10/1988

Sumber: Diolah Penulis dan diadaptasi dari <https://investmentpolicy.unctad.org>

Selain itu, pada tahun 1995, Bangladesh bersama 6 (enam) negara di kawasan Asia Selatan lainnya yaitu Bhutan, Maladewa, Sri Lanka, India, Nepal dan Pakistan telah menandatangani *Preferential Trade Agreement* (PTA) yang disebut dengan *South Asian Preferential Trade Agreement* (SAPTA) dan pada tahun 2000 menandatangani *South Asian Free Trade Agreement* (SAFTA) pada tahun 2000. SAFTA merupakan salah satu jalan bentuk liberalisasi perdagangan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut (Ahmed, 2008:5).

Peran Pemerintah Bangladesh dalam Kebijakan Neoliberalisme

Jika melihat sisi internal, kebijakan liberalisasi pasar di Bangladesh didukung oleh rezim politik domestik Bangladesh pada awal tahun 1980-an (Abdin, 2015:2). Faktor politik memang menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Konstelasi politik Bangladesh mengalami perubahan yang cukup dinamis yang diawali dengan kepemimpinan Sheikh Mujibur Rahman (1972-1975) yaitu menganut nasionalisme demokrasi (Khan, 2016). Ideologi ini mendorong kebijakan pembangunan untuk melakukan nasionalisasi industri, baik pada skala medium atau luas. Akibatnya, masalah kemiskinan, sosial, dan *unemployment* yang tinggi tidak dapat diselesaikan dengan maksimal karena kebijakan proteksi yang dilakukan pemerintah Bangladesh terhadap industri domestik (Banna, 2014).

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Mujibur Rahman dan digantikan oleh Ziaur Rahman (1975), pola kebijakan industri di Bangladesh mengalami perubahan yang signifikan. Bangladesh telah menerapkan kebijakan neoliberal sejak awal 1980-an yaitu melalui *structural adjustment policies* atau kebijakan penyesuaian struktural dengan melaksanakan reformasi ekonomi pro-pasar pada Desember 1975. Pasca penggulingan tersebut dimulailah kebijakan reformasi yang terdiri dari: kebijakan manajemen permintaan (*demand management policies*) seperti pengurangan pengeluaran pemerintah; kebijakan penyesuaian struktural yaitu melakukan liberalisasi perdagangan dan penghapusan subsidi; serta kebijakan kelembagaan (*institutional policies*) seperti denasionalisasi dan privatisasi ekonomi. Paket reformasi tersebut telah mempengaruhi arah dan tren ekonomi Bangladesh dari aspek kinerja makro dan mikro ekonominya (Nuruzzaman, 2004:34).

Ziaur Rahman lebih memfokuskan kebijakannya pada pertumbuhan sektor privat, denasionalisasi perusahaan industri pada skala besar, mendorong investasi sektor swasta, dan penyediaan pinjaman lunak dengan bunga rendah. Ziaur Rahman juga mengeluarkan kebijakan peningkatan ekspor Bangladesh di sektor garmen sebagai agregasi pasar dalam mendorong kompetisi di level internasional (Banna, 2014). Zia dikenal sebagai inisiator pembangunan liberalisasi di Bangladesh melalui reformasi kebijakan liberal yang berorientasi pasar atau "*market-oriented liberalizing policy*" di mana pada pertengahan tahun 1980 Zia mengizinkan masuknya kebijakan IMF dan Bank Dunia (Mahmud, Ahmed, dan Mahajan, 2008:9).

Peran pemerintah yang bersifat pro aktif sejak awal tahun 1990 dengan dikeluarkannya program reformasi makroekonomi, mendorong transisi parlemen demokrasi dari pemerintah sebelumnya yang bersifat semi otokratis.

Reformasi tersebut memiliki tujuan dalam menggerakkan ekonomi yang semakin terbuka dan menghapus hampir semua kontrol pergerakan modal investasi modal asing di Bangladesh (Mahmud, Ahmed, dan Mahajan, 2008:3).

Hubungan antara Modal dan Tenaga Kerja (*Capital-Labor Relation*) di Bangladesh

Di era neoliberal, penentuan upah dan kondisi kerja beralih dari negosiasi pekerja dengan manajemen perusahaan beralih ke kekuatan pasar. Ketika kekuatan serikat buruh berkurang, bahkan serikat yang sebelumnya kuat dan telah memenangkan kenaikan upah reguler, akan dipaksa untuk menerima pembekuan upah, pemotongan upah yang besar, atau struktur upah dua tingkat yang menyediakan upah untuk karyawan baru serendah setengah dari tingkat upah pekerja saat ini (Kotz, 2015:27).

Salah satu keuntungan dalam mengoperasikan bisnis di Bangladesh yaitu mencakup biaya tenaga kerja yang relatif kompetitif, jumlah tenaga kerja yang besar, pasar yang cukup besar dan akses preferensial ke beberapa pasar asing tentu saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Bangladesh (Ahmed, 2008:13). Hal ini bisa dilihat dari sektor garmen dan tekstil di Bangladesh yang telah berhasil menyediakan tenaga kerja dengan upah yang rendah.

Siginifikasi sektor garmen dan tekstil dalam menarik investor asing telah dikemukakan oleh Muhammad Yunus dan Tatsumi Yamagata bahwa selain upah yang rendah, kemampuan buruh menjadi strategi penting dalam pengembangan industri garmen di Bangladesh. Maka dari itu, perusahaan atau investor asing berusaha untuk mendapatkan buruh dengan kemampuan yang mumpuni atau terampil ditambah lagi dengan upah yang rendah. *Skilled labour* sebagai daya tarik investor juga diasumsikan memiliki kemampuan untuk menguasai

perkembangan teknologi. Sebuah pabrik manufaktur yang memiliki buruh trampil akan lebih proaktif dalam melakukan pembaharuan teknologi. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan *skilled labor* di Bangladesh, sebagai salah satu mata rantai global, Bangladesh Garment Manufactures and Exporters Association (BGMEA) membangun sebuah institusi khusus, National Institute of Fashion Technology (NIFT) Bangladesh pada tahun 1986. Institusi ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pasokan tenaga kerja terampil di industri garmen (Yunus dan Yamagata, 2012: 19-21). Namun, tidak semua masyarakat Bangladesh mampu menikmati pembekalan keterampilan (*cutting, stitching, dan pressing*) NIFT. Dari 79 juta buruh di Bangladesh, hanya sekitar 5% pekerja buruh yang mendapatkan *training*, dengan 1% mendapatkan pembekalan vokasi.

Tabel 3 Permasalahan Pelaku Industri dan Respon dari *Leadership at The Top* Bangladesh

No	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1	Produktivitas buruh menurun.	- BGMEA (yang dipimpin langsung oleh PM Bangladesh) memberi program <i>skill training</i> (<i>cutting, stitching, dan pressing</i>) untuk para buruh garmen. - Program Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Teknis (TVET) untuk meningkatkan keterampilan kerja, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan.
2	Upah buruh yang stagnan hingga memunculkan fenomena <i>huge labor unrest</i> .	- Peningkatan upah dari Tk930 menjadi Tk1662 (US\$25). - Mempermudah kemudahan akses kredit bagi buruh.
3	Ketidakseimbangan antara hak pabrik dan buruh.	BGMEA dan <i>Bangladesh Knitwear Manufacture</i> akan memonitor hak buruh pabrik dalam segi waktu kerja dan upah.
4	Keadaan lokasi pabrik.	BEPZA melakukan beberapa langkah : - Memperbaiki kondisi fisik pabrik - Menyediakan lokasi pasar baru - Memperbaiki kualitas produk

Sumber: Diolah Penulis dari berbagai sumber seperti Ahmed, 2009, Yunus dan Yamagata, 2012 dan *National Skills Development Policy, Ministry of Education Government of Peoples Republic of Bangladesh, 2011*.

Selain itu, pemerintah Bangladesh mengajukan program Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Teknis (TVET) untuk meningkatkan keterampilan kerja, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Visi pemerintah dalam melakukan pengembangan keterampilan yaitu: "Pengembangan keterampilan di

Bangladesh akan diakui dan didukung oleh pemerintah dan industri sebagai strategi yang terkoordinasi dan terencana demi pembangunan nasional dan perusahaan.” Program pengembangan keterampilan buruh (*labor skill*) dijalankan untuk memastikan daya saing Bangladesh di pasar global yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi *lead firm* tingkat internasional (National Skills Development Policy, Ministry of Education Government of Peoples Republic of Bangladesh, 2011). Pelatihan industri *Ready Made Garment* (RMG) saat ini dijalankan oleh Pusat Pelatihan Teknis Pemerintah dan beberapa perusahaan menjalankan program pelatihan yang lebih formal (seperti H&M, Adidas, Tesco) (<http://sudokkho.org>). Kemampuan atau skill pekerja buruh di Bangladesh tidak kalah dengan negara lain seperti China, Indonesia, serta Vietnam dan tetap memiliki tingkat upah yang kompetitif.

Penguatan *Corporate Sector* dalam Kebijakan Industrialisasi di Bangladesh

Pada sistem neoliberal, persaingan antar perusahaan besar dan kecil memiliki kesempatan yang sama untuk masuk pasar. Bahkan perusahaan terbesar pun akan dipaksa untuk menghadapi kemungkinan tidak hanya kehilangan uang untuk jangka waktu tertentu saja tetapi kemungkinan diusir dari bisnis atau pasar apabila kalah bersaing (Kotz, 2015:29).

Keterlibatan sektor privat atau swasta di Bangladesh dapat dilihat dari adanya krisis ekonomi yang terjadi pada masa kepemimpinan Jenderal Zia (1975-1981) di bawah rezim Liga Awami (Awami League/AL) akibat kebijakan intervensionis berlebihan yang diadopsi oleh pemerintahan Mujib pasca-kemerdekaan. Zia dengan cepat memutuskan untuk menjauh dari pendekatan yang dipimpin oleh negara dan mengambil inisiatif tegas untuk membangun struktur ekonomi yang ramah pasar, yang dituangkan dalam *Revised*

Investment Policy pada Desember 1975 (RIP 1975). Kebijakan ini berfokus pada pembangunan sektor swasta (privat) yang kuat dan berdasarkan pada strategi pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor untuk mengurangi defisit anggaran dan inflasi, meningkatkan tabungan domestik dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Pada masa ini juga didorong adanya pengalihan perusahaan milik negara (BUMN) ke sektor swasta, dan mendorong pengusaha swasta untuk berinvestasi di hampir semua sektor penting dan strategis. Kebijakan RIP 1975 secara signifikan telah meningkatkan investasi swasta menjadi Tk.100 juta di Bangladesh dan pemerintah Bangladesh mengumumkan tidak akan pernah menasionalisasi perusahaan swasta. Kebijakan RIP 1975 ini juga memberikan peluang baru bagi investor asing, serta memfasilitasi pembentukan *Export Processing Zone* (EPZ) pertama di kota pelabuhan Chittagong. (Quadir, 2000: 199).

Pada masa kepemimpinan Zia, juga dilakukan kebijakan deregulasi ekonomi dengan membentuk *Disinvestment Board* yang diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan privatisasi. Dewan ini kemudian bertindak cepat dengan mengaktifkan Bursa Efek Dhaka dan mendirikan Pusat Promosi Investasi (*Investment Promotion Center*) di Dhaka yang dirancang untuk mendorong investasi swasta serta mengarahkan *Development Finance Institutions* (DFI) untuk memberikan support dukungan finansial kepada pengusaha swasta. (Quadir, 2000: 199).

Dalam rangka menarik FDI yang lebih besar lagi, langkah pemerintah Bangladesh yaitu menerapkan kebijakan privatisasi atau denasionalisasi terhadap beberapa perusahaan atau pabrik nasional (BUMN) yang sudah mulai dilakukan pada tahun 1980-an. Contoh perusahaan yang di privatisasi oleh Bangladesh salah satunya adalah perusahaan tekstil yang diumumkan saat deklarasi Kebijakan Industri Baru

(*New Industrial Policy*) tahun 1982 di bawah rezim Hussain M. Ershad (1982-1990). Kepemimpinan Ershad dikenal sebagai pemimpin diktator. Di tengah kediktatorannya, Ershad merevisi kebijakan industri hingga menghasilkan *Revised Industrial Policy* 1986 (RIP 1986). Di dalam kebijakan industri baru, Ershad melakukan langkah lebih lanjut terhadap kebijakan sebelumnya dengan menambah “daftar prioritas industri” yang dikelola oleh *Director General of Industries* untuk industri kelas menengah hingga besar, dan BSCIC untuk industri kelas kecil dan rumahan (Quadir, 2000:202).

Dengan adanya daftar prioritas industri tersebut, maka refleksi atas kebijakan pemerintah dalam mengurangi peran sektor publik di ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan sektor swasta, perusahaan sektor publik dimaksudkan untuk dikonversi menjadi perusahaan terbatas publik. Semua investasi asing yang masuk ke Bangladesh diwajibkan melakukan registrasi di salah satu lembaga yang sudah disiapkan oleh pemerintah Bangladesh (Haq, 2008:20):

1. BEPZA
2. BSCIC
3. *Board of Investment* (BOI)

Registrasi dengan *sponsoring agency* tersebut, merupakan langkah *one stop service* sebagai salah satu poin daya tarik bagi investor swasta lokal maupun asing. Kondisi ini dapat dibandingkan dengan keadaan di India yang membutuhkan waktu 80 hari untuk melakukan izin kegiatan bisnis meskipun pada skala ekonomi kecil, sedangkan perizinan bisnis di Bangladesh dilakukan dengan waktu yang lebih singkat (Sahoo, 2006:20). Keuntungan lain, selain pengurusan izin yang lebih cepat, di bawah kebijakan RIP 1986, pemerintah Bangladesh memperkenalkan insentif fiskal dan insentif lainnya untuk memperkenalkan

perkembangan industri yang pesat. Sejumlah barang impor yang dibatasi dan mengalami pembatasan kuantitatif mulai diberi kelonggaran untuk alasan efisiensi dan kecepatan industri. Sayangnya, kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena kondisi negara tidak kondusif.

Kebijakan neoliberal di Bangladesh masih berlanjut meskipun Era kepemimpinan Jenderal Ershad berakhir dan diganti rezim BNP Khaleda Zia (1991-1996) (istri Jenderal Zia) yang terpilih secara demokratis pada tahun 1991 di mana implementasi program liberalisasi dilakukan secara masif. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan M. Saifur Rahman, rezim Khaleda mengumumkan Kebijakan Industri Nasional (*National Industrial Policy* 1991) yang menekankan perlunya menerapkan program privatisasi besar-besaran dan penghapusan subsidi di sektor rami (*jute*) yang dianggap sebagai sumber utama mengurasnya anggaran pemerintah (Quadir, 2000: 205). Sama seperti kepemimpinan suaminya, Khaleda Zia mengantarkan Bangladesh ke arah yang lebih demokratis. Perubahan yang paling jelas bahwa kebijakan telah dieksekusi di arena rezim pertukaran asing dan rezim perdagangan. Perubahan terdiri dari pasar bebas, paradigma neo-klasik, *outward looking*, serta strategi utama pertumbuhan ekspor atau *export-led strategy*. Kondisi positif ini mengantarkan *turning point* yang cukup signifikan pada keadaan industri di Bangladesh.

Banyak aktivitas yang mendukung, seperti insentif buruh dan investasi pada tiga sumber pendapatan utama: *readymade garment*, *crop production*, dan tenaga kerja asing (Mahmud, Ahmed, dan Mahajan, 2008:8). Dalam *Industrial Policy 1991* juga terdapat insentif investasi, khususnya, bagi industri berorientasi ekspor, diperluas dan disederhanakan bagi investor lokal dan asing tanpa adanya diskriminasi diantara keduanya.

Industrial experience Bangladesh didapat dari proses industrialisasi bersama

Pakistan sebelum melepaskan diri pada tahun 1971. Bangladesh telah lama dikenal sebagai pusat produksi tekstil berkualitas di dunia. Keadaan tersebut tidak terlepas dari perjalanan sejarah industri garmen di Bangladesh (Lewis, 2011:148). Berawal dari lepasnya Pakistan Timur dan Barat dari India di tahun 1947, hampir seluruh modal dan sumber daya Pakistan berada dibawah kontrol Pakistan Barat. Industri tekstil yang berlokasi di Pakistan timur menjadi lebih stagnan sebagai risiko atas momentum pergeseran pembangunan dari bagian Pakistan Timur ke Pakistan Barat saat itu (Mahmud, Ahmed, dan Mahajan, 2008:3). Hal ini tidak berarti bahwa Pakistan Timur bebas dari aktivitas industri, terbukti bahwa *cotton* industri dikembangkan di Timur sebagai penopang industri tekstil pusat di Pakistan Barat.

Ketika Bangladesh mendapatkan kemerdekaannya dari Pakistan Barat tahun 1971, pemerintahan baru segera melakukan nasionalisasi terhadap industri-industri tekstil yang berlokasi di Pakistan Timur. Pabrik dan perusahaan tekstil dinasionalisasi dan diorganisir dibawah *Bangladesh Textile Mills Corporation* (BTMC) (Mahmud, Ahmed, dan Mahajan, 2008:3). Sebagai negara independen baru, Bangladesh mewarisi beberapa perusahaan industri besar baik di bidang tekstil maupun di bidang lain seperti baja, gula, dan rami. Industri-industri tersebut dulunya dibentuk dengan menggunakan subsidi besar dari pemerintah Pakistan (Muhammad, 2011).

Alasan untuk menerapkan kebijakan privatisasi terhadap perusahaan nasional (BUMN) adalah kerugian yang dialami secara terus-menerus oleh perusahaan BUMN sehingga pemerintah dianggap tidak perlu untuk ikut campur dalam mengelola industri. Hal ini ditandai dengan beberapa faktor misalnya, pada tahun 1970-an dan awal 1980-an perusahaan BUMN di Bangladesh memiliki kinerja manajerial yang buruk dan birokrasi yang gendut (yaitu kelebihan pegawai) serta memiliki ketergantungan

yang tinggi terhadap subsidi pemerintah. Menurut Kashem et. al. dari tahun 1972 hingga 1989, perusahaan BUMN di Bangladesh telah mengalami kerugian tahunan sebesar Taka 16 miliar (US \$ 360 juta) dan jumlah total subsidi untuk sektor ini pada tahun 1970-an dan 1980-an mencapai Taka 450 miliar (US \$ 10 miliar) (Nuruzzaman, 2004:36).

Di awal perkembangan industri garmen Bangladesh, hanya terdapat sembilan unit ekspor yang berorientasi pada manufaktur garmen. Beberapa unit diantaranya sangat kecil, meski orientasi pasarnya cukup besar di ranah domestik dan internasional (ekspor) (Yunus dan Yamagata, 2012). Pabrik garmen pertama di Bangladesh, bekas Timur Pakistan, dibangun pada tahun 1960 di Dhaka (Blumer, 2016:22). Sebagai contoh, salah satu unit usaha garmen adalah “Garment Reaz” yang dibangun pada tahun 1960 sebagai *small tailoring outfit*. Hingga pada tahun 1973, ketika kebijakan industri pemerintah mengarah pada keadaan yang pro pasar, perusahaan ini mengubah nama menjadi “M/s Raez Garment” dan menginisiasi dimensi baru dengan mengirimkan 1000 pcs produk tekstil (kaos laki-laki) ke sebuah perusahaan pakaian ternama di Paris.

Dalam menciptakan efisiensi, Bangladesh membentuk tujuh otoritas badan investasi, dimana empat badan diantaranya diperuntukan untuk tipe investasi asing (FDI). (lihat tabel 4) badan-badan investasi yang dibentuk merupakan representatif atau ‘tangan panjang’ dari peran leadership at the top Bangladesh. Agensi tersebut menjadi pemegang kunci utama dalam menjalankan peran strategis pemerintah, yaitu sebagai agen promosi dan pelayanan fasilitas investasi industri di Bangladesh (Ahmed, Alam, dan Afzal, 2015:226).

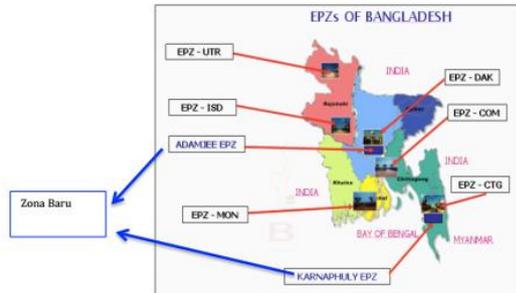
Tabel 4 Otoritas Badan Investasi di Bangladesh

No	Agency	Areas of Concern	Investment Type
1	BIDA (Bangladesh Investment Development Authority)	The principal private investment promotion, facilitation agency to accelerating industrial development	FDI & Domestic
2	BSCIC (Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation)	Small cottage industries	Domestic
3	BEPZA (Bangladesh Export Processing Zones Authority)	Exportes Oriented Industries located in EPZs	FDI & Domestic
4	BOI (Board of Investment)	All other industries including promotion	FDI & Domestic
5	BEZA (Bangladesh Economic Zones Authority)	Established New Industrial Area	FDI & Domestic
6	PPP (Public Private Partnership)	Partnership with National & International Investment Community	FDI & Domestic
7	Privatization Commission	Privatization of Public Enterprises	Domestic

Sumber: Hasil kompilasi penulis dari beberapa sumber serta merujuk pada Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) dalam <http://www.boi.gov.bd> dan Ahmed, Alam, dan Afzal, 2015:227

Selain itu, pemerintah Bangladesh juga mengembangkan EPZ (*export processing zone*) sebagai akses kemudahan yang diberikan kepada pelaku industri garmen dan investor asing dalam memproduksi barang ekspor (garmen) yang terintegrasi satu sama lain.

Gambar 1 Zona Pengelolaan Ekspor (EPZ) di Bangladesh



Sumber: Hossain, 2017 (<http://bepza.go.bd>)

Zona pertama dibangun di daerah South Haliashar di Chittagong pada tahun 1983. Kesuksesan pertama EPZ di Chittagong, pemerintah Bangladesh kemudian memutuskan untuk mendirikan zona ekspor kedua di Kota Savar, tidak jauh dari ibu kota Bangladesh, Dhaka, di tahun 1993. Dengan terbentuknya zona ekspor, agregat aktivitas industri garmen di Bangladesh semakin tinggi, pemerintah memutuskan untuk membangun empat zona ekspor baru yang terletak di Mongla (pelabuhan selatan Bangladesh), Comilla

(suatu area strategis yang terletak antara Dhaka dan Chittagong), Ishwardi (dekat dengan Jamuna Bridge), dan yang keempat terletak di Niphamari berdekatan dengan Syedpur Airport. Kemudian, pada tahun 2000-an dua lokasi baru EPZ diperkenalkan, yaitu terletak di Adamjee Jute Mills dan Karnaphuli Steel Mills.

Arus modal asing dan bahan baku pada perusahaan yang berlokasi di EPZ mendapatkan kemudahan dengan dibebaskannya dari bea impor. Selain itu, perusahaan tersebut juga diperkenankan untuk mempertahankan pendapatan mata uang asing, mempekerjakan tenaga kerja asing dan non-serikat pekerja serta menikmati pembebasan pajak selama sepuluh tahun. Dengan adanya EPZ ini, menurut BEPZA (2006) ada sekitar 143 perusahaan yang beroperasi di EPZ yang mewakili investasi kumulatif lebih dari US \$ 400 juta, mempekerjakan 92.000 orang, dan menghasilkan pendapat ekspor sekitar US \$ 700 juta per tahun (Rahman, 2014:9).

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi di Bangladesh diorientasikan pada kegiatan-kegiatan industri yang awalnya bergerak dari ekonomi agraris. Kegiatan industrialisasi yang ditujukan untuk menarik investasi asing di Bangladesh merupakan dampak kebijakan neoliberalisme yang dilakukan melalui empat cara.

Pertama, proses integrasi ekonomi Bangladesh dengan ekonomi global yang ditandai dengan masuknya bantuan asing (*foreign aid*) dan intervensi dari lembaga-lembaga donor tersebut yang memiliki peranan penting dalam mensponsori agenda kebijakan neoliberal di Bangladesh melalui program-program seperti *green revolution*, Program Penyesuaian Struktural atau *structural adjustment programme* (SAP), Program Pengentasan Kemiskinan (*poverty alleviation*), perjanjian GATT, Bantuan luar negeri yang ditujukan untuk mendukung

perdagangan internasional, bantuan teknis, reformasi, konsultasi, pelatihan dan pendidikan, dan *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP).

Kedua, kebijakan neoliberal dalam kegiatan industrialisasi di Bangladesh didukung oleh rezim politik yang berkuasa. Hal ini dapat dilihat Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Mujibur Rahman dan digantikan oleh Ziaur Rahman yang terjadi pergeseran kebijakan industri di Bangladesh dengan adanya kebijakan neoliberal sejak awal 1980-an yaitu melalui *structural adjustment policies* dengan melaksanakan reformasi ekonomi pro-pasar yang terdiri dari kebijakan manajemen permintaan (*demand management policies*); kebijakan liberalisasi perdagangan dan penghapusan subsidi; serta kebijakan kelembagaan (*institutional policies*) seperti denasionalisasi dan privatisasi ekonomi.

Ketiga, kebijakan neoliberal di Bangladesh telah memberikan peluang bagi para investor asing untuk mengakses tenaga kerja yang terampil dan murah, khususnya pada sektor garmen dan tekstil. Hubungan antara pemilik modal dan tenaga kerja di sini dapat dilihat dari pelatihan formal oleh H&M, Adidas, Tesco dan juga oleh Bangladesh Garment Manufactures and Exporters Association (BGMEA) melalui National Institute of Fashion Technology (NIFT) Bangladesh dalam pemenuhan kebutuhan pasokan tenaga kerja terampil di industri garmen.

Keempat, dalam rangka menarik investor asing, Bangladesh melakukan penguatan *corporate sector* melalui kebijakan industrialisasinya. Kebijakan privatisasi atau denasionalisasi terhadap beberapa perusahaan atau pabrik nasional (BUMN) dilakukan perusahaan tekstil yang didenasionalisasi melalui Kebijakan Industri Baru (*New Industrial Policy*). Selain itu, peran sektor publik dalam perekonomian semakin dikurangi, sedangkan peran dari sektor swasta lebih ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam revisi kebijakan industri Bangladesh, yaitu

Industrial Policy 1991 (IP 91) sehingga Bangladesh kemudian mengalami fase pengalaman industri liberalisasi perdagangan yang paling proaktif.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kotz, David M. (2015). *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. United States: Harvard University Press.
- Lewis, D. (2011). *Bangladesh Politics, Economy and Civil Society*. New York: Cambridge University Press.
- Rahman, Shahidur. (2014). *Broken Promises of Globalization: The Case of the Bangladesh Garment Industry*. Plymouth, UK: Kexington Books.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

- Abdin, (2015). Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh: Trades, Challenges and Recommendations. *International Journal of Economics & Management Sciences*, Vol.4, No. 8.
- Ahmed, N. (2009). Sustaining Ready-Made Garment Exports from Bangladesh. *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 39, No. 4, pp. 597-618.
- Ahmed, S., Alam, Z., dan M. K. Afzal. (2015). Laws, Regulations Formalities and Facilities or Incentives on Investment: A case of Bangladesh. *The USA Annals of Economics and Public Administration*, Vol. 15, No.2.
- Blumer, H. (2016). Internal Communication in Bangladesh Ready-Made Garment Factories, Best Masters. *Springer Fachmedien Wiesbaden*, 2016.

- Mahmud, W., Ahmed, S. dan S. Mahajan. (2008). Economic Reforms, Growth, and Governance: The Political Economy Aspects of Bangladesh's Development Surprise, The Political Economy Aspects of Bangladesh's Development Surprise. *Working Paper*, No. 22, Washington.
- Muhammad, A. (2006). Globalisation and Economic Transformation in a Peripheral Economy: The Bangladesh Experience. *Economic and Political Weekly*, April 15.
- Muhammad, A. (2011). Wealth and Deprivation RMG Industri in Bangladesh. *Economic & Political Weekly*, Vol. 46 No. 34.
- Nuruzzaman, Mohammed. (2004). Neoliberal economic reforms, the rich and the poor in Bangladesh. *Journal of Contemporary Asia*, 34:1, pp.33-54.
- Quadir, Fahimul. (2000). The political economy of pro-market reforms in Bangladesh: Regime consolidation through economic liberalization? *Contemporary South Asia*, 9:2, pp.197-212, DOI: 10.1080/713658731.
- Rachmat, Angga Nurdin. (2013). Perangkap Pembangunan Ekonomi Berbasis Neoliberalisme dan Ironi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kosmopolitan*, 1 (1), Januari-April.
- Sahoo, P. (2006). Foreign Direct Investment in South Asia: Policy, Trends, Impact and Determinants. *ADB Institute Discussion Paper* No. 56, November.
- Shamit, Mehran. (2016). Rethinking Microcredit in Bangladesh: Does Grameen Bank Serve the Neoliberal Agenda? *Inquiries Journal*, Volume 8 Nomor 9.
- Syeirazi, M. Kholid. (2003). Dilema Praktis Globalisme Neoliberal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 7 Nomor 1 Juli.
- Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian**
- Banna, H. (2014). The Review of Industrial Policies in Bangladesh from 1971-2014 (daring), 30 Desember 2014. Retrieved from <https://www.slideshare.net/hasanulbannanotunkuri/the-review-of-industrialpolicies-in-bangladesh-from-1971-2014>, diakses pada 5 April 2017.
- Haq, Ashek Ishtiaq. (2008). The Review of the Investment Policies of Bangladesh, 2008. Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/3886600/The-Review-of-the-Investment-Policies-of-Bangladesh>, diakses pada 3 Maret 2020
- Khan, M.Z. Islam. (2013). Paradox of State Fragility: Exploring The Role of Internasional Structures in the Context of Bangladesh, *MA Dissertation*. University of Reading 2012-2013.
- Yunus, M. dan Yamagata, T. (2012). The Garment Industry in Bangladesh, Dynamics Industry in Low Income Countries: Experience Asia and Africa. *Interim Report*, Fukunishi (ed.), IDE-JETRO
- Rahman, A. (2012). Foreign Direct Investment in Bangladesh, Prospects and Challenges, and Its Impact on Economy. A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Professional Master in Banking and Finance, Asian Institute of Technology, Thailand.

Internet

Ahmed, Salahuddin. (2008). Bangladesh and Global Economy: Does Bangladesh Keep Pace with Economic Globalization?. *AIUB Bus Econ Working Paper Series*, No 2008-07, February. Retrieved from <http://orp.aiub.edu/WorkingPaper/WorkingPaper.aspx?year=2008>, diakses pada 3 Maret 2020.

<https://investmentpolicy.unctad.org/>, diakses pada 3 Maret 2020.

Khan, M. H. (2016). Genesis of Bangladesh's Constitutions, Mujibnagar Day (daring), 17 April 2016. Retrieved from <http://www.thedailystar.net/op-ed/genesis-bangladeshs-constitution-1209718>, diakses pada 6 April 2017.

Internet (Dokumen Pemerintah/ resmi):

Bangladesh Investment Development Authority (BIDA). Retrieved from <http://www.boi.gov.bd>.

Hossain, Z. (2017). Export Diversification and Role of Export Processing Zone (EPZ) in Bangladesh, BEPZA (daring). Retrieved from <http://bepza.go.bd/>, diakses pada 12 Oktober 2017.

National Skills Development Policy, Ministry of Education Government of Peoples Republic of Bangladesh. (2011). Retrived from <http://www.ilo.org/>, diakses pada 20 Desember 2017.

Sudokkho. (2017). Skill Development in Bangladesh (daring). Retrived from <http://sudokkho.org/about-us/skillsdevelopment-in-bangladesh/>, diakses pada 27 April 2017.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). Bilateral Investment Treaties Bangladesh. Retrieved from